Hak dan kewajiban Pasien

Hak Dan Kewajiban Seorang Pasien Sebagai Konsumen

Putri Ayu Venty El Hanief
Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia
ventyhanief@gmail.com

Abstrak

Masalah kesehatan fisik dan mental tentu bukan hal yang dapat dipandang sebelah mata. Apalagi hal yang menyangkut nyawa manusia. Seorang individu bila mengalami masalah kesehatan akan mempengaruhi aktifitas kehidupan sehari-hari. Rumah sakit merupakan fasilitas umum yang memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai institusi yang di akses publik, rumah sakit sama dengan layanan publik lainnya antara penjual dan pembeli yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagai fasilitas kesehatan, rumah sakit melayani masyarakat umum, selalu mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Dalam beberapa kasus diekspos oleh media massa, bahkan acapkali menjadi trending topic. Untuk itu hadir lah hak dan kewajiban dan tanggung jawab pasien rumah sakit. Dalam bidang kesehatan hak dan kewajiban menjadi hal yang sangat penting dan muhtlak untuk di laksanakan. Mengingat kelalaian untuk memenuhi hak dan kewajiban akan menimbulkan akibat yang tidak kecil, yakni berupa tuntutan ganti kerugian ataupun dapat diduga melakukan tindak pidana yang di ancam dengan sanksi pidana seperti hukuman mati, penjara maupun denda bahkan sanksi pencabutan hak hak yang melekat pada setiap individu tersebut. Dalam pelayanan kesehatan yang di dalamnya terkandung hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik secara otomatis timbul hak dan kewajiban dokter dan pasien sebagai akibat hukum dari adanya hubungan hukum pelayanan kesehatan tersebut.

Kata Kunci : Hak, Kewajiban, Pasien

1. Latar Belakang

Masalah kesehatan fisik dan mental tentu bukan hal yang dapat dipandang sebelah mata. Apalagi hal yang menyangkut nyawa manusia. Seorang individu bila mengalami masalah kesehatan akan mempengaruhi aktifitas kehidupan sehari-hari. Rumah sakit merupakan fasilitas umum yang memberikan layanan

kesehatan bagi masyarakat. Sebagai institusi yang di akses publik, rumah sakit sama dengan layanan publik lainnya antara penjual dan pembeli yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagai fasilitas kesehatan, rumah sakit melayani masyarakat umum, selalu mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Mengingat

kelalaian untuk memenuhi hak dan kewajiban akan menimbulkan akibat yang tidak kecil, yakni berupa tuntutan ganti kerugian ataupun dapat diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana seperti hukuman mati, penjara maupun denda bahkan sanksi pencabutan hak-hak yang melekat pada setiap individu tersebut.

2. Kasus/Masalah

Jakarta- Kasus pidana yang menimpa beberapa dokter atas tuduhan malapraktik merupakan cermin masih buruknya pola komunikasi antara dokter dan pasien di Indonesia. Sebagai pihak yang saling membutuhkan, dokter seharusnya dapat menggali bagaimana sesungguhnya kondisi pasien. Hal yang sama juga harus dilakukan pasien dengan proaktif bertanya tentang kondisi dan pengobatan yang sebaiknya dijalani. Dengan kerja sama ini, kasus serupa mungkin dapat dihindari. "Saya menduga mungkin kasus ini dikarenakan pola komunikasi yang buruk. Dokter kurang menggali informasi dari pasien akibatnya terjadi hal fatal usai operasi", Kata pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, kepada KOMPAS Health, Selasa (26/11/2013) kemarin. Buruknya komunikasi dokter di

perkuat survei yang pernah dilakukan pada 2008-2009 tersebut membuktikan, masyarakat merasa tidak mendapat info yang tepat terkait penyakit atau pengobatan dari dokter yang memeriksa. Akibatnya, pasien cenderung pasrah pada tindakan apa pun yang diambil dokter demi kesembuhan penyakit mereka. Padahal, komunikasi, lanjut Tulus, menjadi kunci kesembuhan pasien. Hal ini karena kondisi dan jarak pengetahuan yang dimiliki antara dokter dan pasien. Pasien yang datang dengan kondisi lemah, kata Tulus, tidak memiliki pengetahuan sedikit pun pada apa yang terjadi dengan tubuhnya. Pasien juga nyaris pasrah pada pengobatan apa pun yang akan dilakukan dokter. "Dalam kondisi inilah, posisi dokter nyaris seperti tuhan. Pasien tidak mengetahui proses pengobatan dan semata berharap kesembuhan. Situasi ini bisa diatasi bila dokter mau aktif berbicara pada pasien sejak pertama kali berobat," kata Tulus. Pola komunikasi, kata Tulus sekaligus menjadi pembeda antara layanan dokter Indonesia dan luar negeri. Hal ini yang menyebabkan orang Indonesia lebih suka berobat ke luar negeri kendati kualitas pengobatan yang dimiliki sama.

Tulus mencontohkan Singapura sebagai salah satu negara tujuan pengobatan mayoritas orang Indonesia. Di negeri ini, setiap pasien yang datang akan mendapatkan informasi selengkap-lengkapya terkait penyakit yang diderita. Pasien juga mendapat info terkait pengobatan yang akan dijalani, termasuk risiko yang harus diterima. Hal ini dilakukan tanpa permintaan pasien. "Pasien bahkan menerima info terkait peluang hidupnya. Hal inilah yang tidak terjadi pada kasus dr.Ayu. Pasien tidak diberitahu dan pasif pada tindakan yang diambil. Akibatnya, terjadi kasus emergency yang harus segera ditangani dengan segala risikonya. Kasus emergency tentu tidak bisa dikatakan sebagai malapraktik," kata Tulus. Buruknya pola komunikasi para dokter juga diakui Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Daeng Muhammad Faqih. Menurut dia, dokter Indonesia memang kebanyakan pasif dan kurang mengomunikasikan penyakit serta pengobatan yang harus dijalani pasien. Pasien juga mayoritas tidak aktif bertanya terkait kondisi dan pengobatan yang dijalani. Kondisi ini berlaku sama di seluruh tingkat layanan kesehatan. "Dokter Indonesia harus lebih banyak bicara.

Dengan komunikasi, persepsi antara pasien dan dokter bisa disamakan sehingga pasien paham pada kondisi dan pengobatan yang dijalani, termasuk risiko yang ditanggung," kata Daeng.

3. Tinjauan Pustaka

A. Adapun hak pasien sesuai dengan pasal 32 Undang-undang Rumah Sakit No.44 tahun 2009, yaitu ; Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit, Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi, Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan , Memilih dokter dan kelas perawat sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit , Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit, Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk

data-data medisnya, Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan, Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya, Di dampingi keluarganya dalam keadaan kritis, Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya, Memperoleh keamanan dan keselamatan diriya selama dalam perawatan di Rumah Sakit, Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya, Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, Menggugat dan/atau menurut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standart baik secara perdata ataupun pidana, Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standart pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

B. Sedangkan Kewajiban Pasien Menurut Permenkes No.69 tahun 2014, yaitu : Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit , Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab, Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit, Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya, Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya, Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang di berikan oleh tenaga kesehatan dalam rangkan penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya dan Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang di terima.

4. Pembahasan

A. Pengertian Pasien sebagai Konsumen.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran menyebutkan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

B. Hak Pasien Sebagai Konsumen Menurut UUPK

Hak merupakan satu aspek dan satu kesatuan, malah bagian integral dari hukum, Hukum tanpa adanya hak (wewenang) bukan lagi merupakan hukum, mungkin sekedar kebiasaan sehari-hari yang tidak mempunyai ikatan, sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

C . Kewajiban pasien sebagai konsumen menurut UUPK

Dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

5. Kesimpulan

A. Persetujuan tindakan kedokteran dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang

akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi terhadap pasien. Menurut peraturan menteri kesehatan nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran tersebut, informasi yang pantas kepada pasien tetap diperlukan. Itu sebabnya peraturan menteri tersebut memberikan pemahaman atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien. Setiap pelayanan kesehatan harus mendapat persetujuan tindakan kedokteran khususnya proses pengobatannya yang memiliki resiko tinggi. Persetujuan dari pasien diberikan setelah pasien mendapat penjelasan atau informasi yang diperlukan tentang pentingnya tindakan kedokteran. Tentang informasi yang harus diberikan kepada pasien, mencakup keuntungan maupun kerugian dari tindakan medik tersebut, baik jika diminta oleh pasien atau jika tidak diminta.

6. Daftar pustaka

- Sodik, M. A., Suprpto, S. I., & Pangesti, D. (2013). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Pelayanan Prima Pegawai Di Rsui Orpeha Tulungagung. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 2(1), 24-32.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Attoriq, S., & Sodik, M. A. (2018). Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan Di Lahan Praktik.
- Sodik, M. A. (2018). *Merokok & Bahayanya*.
- Setyani, A. T., & Sodik, M. A. (2018). Pengaruh Merokok Bagi Remaja Terhadap Perilaku dan Pergaulan Sehari-hari.
- Oktoriani, E. N., Sutrisno, J., Mayasari, E., & Sodik, M. A. (2018). Analysis of medical record complete flexibility to complete claims of health BPJS RS Baptis Kota Batu. *Journal of Global Research in Public Health*, 3(1), 46-53.
- Soekarno, S. (1990). *Hak dan kewajiban*